

SKRIPSI

**EFEKIVITAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BRI UNIT
TIMORENG PANUA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



2020

**EFEKIVITAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BRI UNIT
TIMORENG PANUA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



Oleh
ASNIAH
NIM 15.2300.079

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**EFEKIVITAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BRI UNIT
TIMORENG PANUA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**ASNIAH
NIM 15.2300.079**

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DI
BRI UNIT TIMORENG PANUA TERHADAP PENINGKATAN
EKONOMI MASYARAKAT (ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

ASNIAH
NIM. 15.2300.079

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 14 Januari 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	
NIP	:	19730129 200501 1 004	
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Fikri, S.Ag., M. HI.	
NIP	:	19720120 200901 2 002	

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Sultra Rusan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004



Scanned by TapScanner

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Asniah

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.079

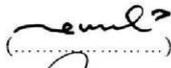
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam No. B. 3674/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Sekretaris)	
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, sebagai nabi pembawa petunjuk keselamatan dunia dan akhirat.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga, terkhusus Ayahanda Tajuddin dan Ibunda Namriyah selaku kedua orang tua penulis yang memberikan do'a, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada saudara-saudara kandungku Rosdiana, Suriani dan Senal Abidin atas bantuan, dukungan dan motivasinya.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus pembimbing I atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi yang selama ini mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.

5. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing ke II atas segala bimbingan, arahan dan bantuan.
6. Seluruh karyawan Bank BRI Unit Timoreng Panua atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Sahabat-sahabat, terkhusus kepada Rahmawati, Agus Priyono, dan Nafilah yang selalu setia menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta teman-teman Perbankan yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
8. Kepada Desy Arum Sunarta, S.H atas arahan dan bimbingannya selama penulisan ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dinilai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Akhirnya semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya, Amiin.

Parepare, 5 November 2019

Penulis



ASNIAH
NIM. 15.2300.079

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asniah
NIM : 15.2300.079
Tempat/tanggal lahir : Lautang Salo, 16 Februari 1997
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit
Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat
(Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 November 2019



Asniah
NIM 15.2300.079

ABSTRAK

Asniah. *Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)*. (dibimbing Oleh Bapak Muhammad Kamal Zubair dan Bapak Fikri).

Penelitian ini membahas tentang efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat di BRI Unit Timoreng Panua terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam) dengan mengajukan 3 permasalahan yaitu pertama bagaimana mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat di BRI Unit Timoreng Panua. Kedua, bagaimana efektivitas penggunaan kredit usaha rakyat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ketiga, bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap hasil penyaluran kredit usaha rakyat di BRI Unit Timoreng Panua terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Tujuan penelitian adalah mengetahui mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BRI Unit Timoreng Panua, mengetahui efektivitas penggunaan Kredit Usaha Rakyat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap hasil mekanisme penyaluran Kredit usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Timoreng Panua melalui beberapa tahap yaitu Tahap permohonan dan pemrakarsa kredit, Tahap Analisis Kredit/Tahap Pemeriksaan, Tahap Pemberian Putusan Kredit dan Tahap Pencairan kredit/Akad Kredit. Efektivitas Penggunaan Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan ekonomi Masyarakat dilakukan menggunakan aspek-aspek Aspek Ketepatan Sasaran, Aspek Ketepatan Waktu, Aspek Ketepatan Jumlah, Aspek Ketepatan Beban Kredit, dan Aspek Ketepatan Prosedur. Dalam penyaluran KUR kepada masyarakat Timoreng Panua berdasarkan pada nilai yang menjadi sumber sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antara lain Kepemilikan, keseimbangan dan keadilan agar dapat efektif dalam penyalurannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas, Peningkatan Perekonomian, dan ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
221 Konsep Efektivitas.....	7
222 Kredit Usaha Rakyat.....	11
223 Peningkatan Ekonomi Masyarakat.....	19
224 Ekonomi Islam.....	22
2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Kerangka Pikir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.2 Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BRI Unit Timoreng Panua.....	38
4.3 Efektivitas Penggunaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat.....	49
4.4 Analisis Ekonomi Islam terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua.....	64

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....	84
---------------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kab. Sidrap, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
3.	Surat Izin Penelitian dari BRI Cab. Sidrap ke BRI Unit Timoreng Panua	Terlampir
4.	Panduan Wawancara	Terlampir
5.	Data Mentah (Transkrip Wawancara)	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Riwayat Hidup	Terlampir



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang Panjang. Sama halnya masyarakat Timoreng Panua Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang selalu berusaha mengerjakan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka memiliki banyak bentuk usaha yang dapat dilakukan agar mampumeningkatkan perekonomian mereka seperti, Bertani, beternak, berdagang,.perindustrian dan pelayanan jasa.

Namun dalam kegiatan tersebut mereka terkendala dengan adanya modal untuk pengembangan usaha mereka. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan sumber modal untuk usaha. Dengan adanya lembaga keuangan bank atau Lembaga non bank mereka dapat meminjam modal untuk pengembangan usaha mereka. Kredit usaha rakyat merupakan suatu program pemerintah yang diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 yang merupakan sebuah fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah melalui PT. Askrido dan Perum Sarana pengembangan usaha. Untuk menyukseskan pelaksanaan KUR ini pemerintah menjalin kerjasama dengan beberapa Bank

Pelaksana yang bisa menyalurkan KUR seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin.¹

Di BRI unit Timoreng Panua merupakan salah satu bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat untuk kegiatan usaha dengan mekanisme penyaluran antara lain, nasabah mengajukan permohonan ke pihak bank. Kemudian pihak bank akan memproses permintaan nasabah. Dalam proses ini nasabah akan diminta kelengkapan berkas seperti adanya sertifikat jaminan, jaminan, usaha dari nasabah itu sendiri. Sebelum melakukan pencairan pihak bank terlebih dahulu melakukan *survey* jaminan dan usaha nasabah. Kemudian setelah melakukan *survey* pihak bank akan memutuskan apakah usaha dari nasabah berhak menerima KUR atau tidak. Jika semua berjalan dengan lancar, maka dana yang disediakan KUR sudah mendapat persetujuan dalam waktu kunjungan.

Namun demikian kendala yang biasanya menentang pencairan dana KUR dibatalkan adalah calon debitur yang sulit ditinjau saat survei, atau bisa juga karena banyaknya calon debitur sehingga proses pengambilan keputusan harus dilakukan lebih lama. tentang calon debitur yang baru menerima keputusan tentang pengajuan KUR setelah beberapa minggu. Setelah nasabah menerima KUR pihak bank akan melakukan pengawasan setiap tahunnya terhadap usaha dari nasabah. Selanjutnya dalam pembayaran bunga pihak nasabah akan membayar bunga setiap bulannya dalam jangka waktu yang ditentukan sejak awal perjanjian. Dalam pemberian KUR ada beberapa unsur yang diperhatikan oleh pihak bank yakni, penilaian

¹Cermati.com, *KUR dan Cara Mendapatkannya* (Artikel yang diakses pada tanggal 6 Juli 2019).

watak/kepribadian, penilaian kemampuan, penilaian terhadap modal, penilaian terhadap agunan, penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur.²

Namun sedikitnya mereka yang menerima KUR yang beralasan untuk pengembangan usaha tetapi modal yang diberikan pihak bank disalahgunakan oleh pihak nasabah. Mereka tidak menggunakan untuk keperluan usaha tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif saja. Sehingga kegiatan perekonomian mereka tidak mengalami peningkatan. Tetapi mereka yang memang memerlukan modal untuk usaha, setelah mendapatkan bantuan modal dari pihak bank usaha mereka kembangkan. Seperti yang awalnya hanya mendapatkan omset sekian tetapi setelah mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha, mereka dapat mempekerjakan masyarakat yang ada disekitarnya.

Hal ini yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji tentang efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui penulisan skripsi yang berjudul “*Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat di BRI unit Timoreng

²Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Liberty, 1989), h.15.

Panua terhadap peningkatan ekonomi masyarakat (analisis ekonomi islam) yang dibagi dalam sub masalah sebagai berikut:

- 121 Bagaimana mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BRI Unit Timoreng Panua?
- 122 Bagaimana efektivitas penggunaan Kredit Usaha Rakyat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat?
- 123 Bagaimana analisis ekonomi islam terhadap hasil mekanisme penggunaan Kredit usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua terhadap peningkatan ekonomi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan, sebab tujuan merupakan suatu arah yang ditempuh dan dapat tercapai setelah kegiatan penelitian berakhir. Oleh karena itu, penelitian adalah suatu usaha dan kegiatan yang berproses secara bertahap yang mempunyai tujuan dan kegunaan

- 131 Untuk mengetahui mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh BRI Unit Timoreng Panua.
- 132 Untuk mengetahui efektivitas penggunaan Kredit Usaha Rakyat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat
- 133 Untuk mengetahui analisis ekonomi islam terhadap hasil mekanisme penyaluran Kredit usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua terhadap peningkatan ekonomi masyarakat

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 14.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk menambah keilmuan terutama dalam bidang Perbankan Syariah
- 14.2 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat (analisis ekonomi Islam)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Alit Semara Putra I A. Nyoman Saskara 2013 dengan judul penelitian "*Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*". Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program kredit usaha rakyat terdapat beberapa kekurangan seperti pada indikator tujuan program yaitu tidak tepatnya sasaran program.¹

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan yang dilakukan oleh penulis adalah pada jenis penelitiannya. Pada penelitian terdahulu jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Persamaan antara kedua peneliti ini adalah keduanya membahas Kredit Usaha Rakyat.

¹I Gusti, Alit.S *Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Skripsi Sarjana:Universitas Udayana),h.10.

Kedua, penelitian yang dilakukan Hana Erlinda Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sultan Hasanuddin Makassar tahun 2014 yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Kinerja usaha Kecil Di Kota Makassar*”. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Erlinda bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit usaha rakyat terhadap kinerja usaha kecil di kota Makassar. Metode penelitian yaitu dengan analisis regresi sederhana dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kredit usaha rakyat berpengaruh nyata terhadap pengusaha usaha mikro dan kecil di kota Makassar. Dengan adanya program bantuan KUR bagi pengusaha usaha mikro dan kecil maka terjadi peningkatan pendapatan bagi pengusaha usaha mikro dan kecil di kota Makassar.²

Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hana Erlinda focus terhadap pengaruh pemberian KUR terhadap kinerja usaha kecil di Kota Makassar sedangkan penulis berfokus terhadap efektivitas penyaluran KUR terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Persamaan antara kedua peneliti ini adalah keduanya membahas Kredit Usaha Rakyat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Fatimah, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial di fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon pada tahun 2013 dengan judul “*Efektifitas program kredit usaha rakyat di BRI unit KarangAmpel dalam meningkatkan wirausaha keluarga di desa Karang Ampel Indramayu*”. Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif

²Hana, Erlinda, “*Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Kinerja usaha Kecil Di Kota Makassar*”, (Skripsi Sarjana:Fakultas Ekonomi Dan Bisnis:Universitas Hasanuddin, 2014),70.

antara efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Karangampel dengan Peningkatan wirausaha keluarga di Desa Karangampel- Indramayu.³

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah pada penelitian pada Kredit Usaha Rakyat. Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah penelitian yang digunakan oleh Siti Fatimah, berfokus pada peningkatan wirausaha keluarga terhadap pengambilan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sedangkan pada penelitian saat ini berfokus pada efektivitas penyaluran kur terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Konsep Efektivitas

2.2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi berhasil guna. Efektif berarti dapat mencapai sasaran atau dapat menghasilkan sesuatu yang telah ditentukan. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Secara umum efektivitas merupakan suatu hal yang diinginkan dalam setiap kegiatan termasuk juga program Kredit Usaha Rakyat.

Menurut Supriyono, efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besarkontribusi

³Siti Fatimah, "Efektivitas Program kredit Usaha rakyat di BRI Unit Karang Ampel dalam Peningkatan Wirausaha Keluarga di Desa Karang Ampel Indaramayu", (Skripsi Sarjana: Fakultas Tarbiyah: Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 2013),11

daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁴

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan factor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.⁵

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya didalam setiap Lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu Lembaga atau organisasi itu sendiri.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi atau Lembaga didalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu Lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor

⁴ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), h. 29

⁵ Asnawi, “*efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Pemerintahan: Universitas Muhammadiyah Malang, 2013), h. 6.

⁶ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 61

pendukung efektivitas. Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

2.2.1.2 Ukuran Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Ketepatan Sasaran.

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. Aspek Ketepatan Waktu.

Adanya batasan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam pemberian kredit pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba).

3. Aspek Ketepatan Jumlah

Yaitu ketepatan jumlah yang akan di terima oleh nasabah peminjam kredit dari dana yang di ajukan sebelumnya oleh para nasabah. Dalam pemberian kredit pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari

cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

4. Aspek Ketepatan Beban Kredit

Yaitu ketentuan yang disepakati oleh debitur terhadap kreditur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembebanan (bunga) kredit. Bunga pinjaman merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank.

5. Aspek Ketepatan Prosedur

Adalah langkah langkah yang telah ditetapkan oleh pihak Bank dan disepakati oleh nasabah agar proses peminjaman dapat dilaksanakan. Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk di berikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.⁷

2.2.1.3 Indikator Efektivitas

Menurut Barnard yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.

⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012),h.154.

Dimensi efektivitas program diuraikan menjadi indikator antara lain (1) Kejelasan tujuan program; (2) kejelasan strategi pencapaian tujuan program; (3) perumusan kebijakan program yang mantap; (4) penyusunan program yang tepat; (5) penyediaan sarana dan prasarana; (6) efektivitas operasional program; (7) efektivitas fungsional program; (8) efektivitas tujuan program; (9) efektivitas sasaran program; (10) efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan (11) efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.⁸

2.2.2 Kredit Usaha Rakyat

2.2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*⁹

Menurut Kasmir kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditor*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.¹⁰ Adapun jangka waktu kredit terbagi tiga, yaitu :

⁸Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 27.

⁹Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Kredit,” dalam Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (cet. XVII; Jakarta: rajawali pers, 2016), h. 85.

¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 85.

1. Kredit jangka pendek, kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Penggunaan kredit ini misalnya dipergunakan oleh mereka yang bercocok tanaman yang usia pertanamannya adalah dalam kurun waktu hanya satu tahun.
2. Kredit jangka menengah, kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Debitur biasanya mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut *working capital* yaitu seperti membeli bahan baku, membayar upah buruh, membeli suku cadang dan lain-lainnya.
3. Kredit jangka panjang, kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Debitur biasanya mengajukan dan mempergunakan dana hasil dari kredit ini untuk keperluan investasi, penambahan produksi, atau juga karena produk bisnis yang ditekuninya sudah mulai memasuki pasar luar negeri.¹¹

2.2.2.2 Pengertian Usaha

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.¹² Jenis-jenis usaha terdiri dari:

1. Usaha Mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal dan omzet yang sangat kecil.
2. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang

¹¹Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 72.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1254.

atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari satu milyar.¹³

3. Usaha makro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.¹⁴

2.2.2.3 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit usaha rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit pembiayaan kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K) di bidang usaha produktif dan layak, namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan.¹⁵

Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 7

¹³Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h. 55.

¹⁴Mulyadi Nitisusatro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), h. 268.

¹⁵Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*, www.tnp2k.go.id/itanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 28 Maret 2019

bank pelaksana yaitu, Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, kehutnan, dan industry kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya. Lembaga penjaminan yang terlibat adalah 2 lembaga penjamin nasional yaitu PT Jamkrindo dan PT Askrindo, dan 2 lembaga penjamin daerah, yaitu PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (jamkrinda Jatim) dan PT Jamkrinda Bali Mandara.

Terdapat 3 skema KUR yaitu:¹⁶

1. KUR Makro dengan plafon sampai dengan Rp 20 juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 7% pertahun
2. KUR Ritel dengan plafon dari Rp 20 juta sampai dengan Rp 500 juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 7% per tahun
3. KUR Linkage dengan plafon sampai dengan Rp 2 milyar. KUR linkage biasanya menggunakan Lembaga lain, seperti koperasi, BPR dan Lembaga keuangan Non-Bank, untuk meneruskan pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKM-K.

¹⁶ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*, www.tnp2k.go.id/itanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 28 Maret 2019

a. Jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat

4. KUR Mikro

a) Persyaratan calon debitur

- 1) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.
- 2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
- 3) Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kart kredit.
- 4) Persyaratan administrasi : identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha.

b) Persyaratan Kredit

- 1) Besar kredit maksimal sebesar Rp 25 juta per debitur.
- 2) Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 3 tahun.
- 3) Kredit Investasi (KI) jangka waktu maksimal 5 tahun
- 4) Suku bunga 7% efektif per tahun atau setara 0.41% flat perbulan.
- 5) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi.

1. KUR Ritel

a) Persyaratan Calon Debitur

- 1) mempunyai usaha produktif dan layak.
- 2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
- 3) Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kart kredit.
- 4) Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan.

b) Persyaratan Kredit

- 1) Besar kredit maksimal sebesar >Rp 25 juta – 500 juta per debitur.
 - 2) Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 4 tahun.
 - 3) Kredit Investasi (KI) jangka waktu maksimal 5 tahun
 - 4) Suku bunga 7% efektif per tahun atau setara 0.41% flat perbulan.
 - 5) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi.¹⁷
- b. Prosedur Pemberian KUR

Prosedur pemberian KUR bagi petani oleh Bank BRI menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008, yaitu:

1. Calon nasabah akan diberikan pilihan KUR dengan cara berapa kali angsuran berikut bunga dan jumlah nominal pinjaman pokok yang harus dilunasi nantinya.
2. Apabila sudah memutuskan hal tersebut, calon nasabah peminjam bisa langsung ke *Customer Service* (CS) untuk mendaftarkan pengajuan pinjamannya dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan.
3. CS akan membuat *Customer Information File* (CIF), namun sebelumnya terlebih dahulu CS akan mengecek identitas nasabah untuk menghindari terjadinya pemilihan CIF ganda. Apabila nasabah telah memiliki CIF, maka CS hanya perlu membuatnya rekening baru dengan catatan nasabah belum memiliki rekening. Rekening berfungsi sebagai identitas nasabah.
4. CS akan melakukan pencatatan mengenai berkas nasabah yang bersangkutan ke dalam buku 35 B.

¹⁷<https://bri.co.id/kur>

5. Berkas calon nasabah peminjam akan diserahkan kepada mantri, sesuai kapasitas wewenang yang dimiliki masing-masing mantri. Missal, pinjaman dengan kisaran nominal Rp 25 juta ke bawah akan diserahkan pada mantri KUR.
6. Begitu berkas masuk kepada mantri, langkah berikutnya adalah mantri akan menganalisis berkas tersebut dan kemudian dilakukan survey atau pengecekan mengenai kebenaran (isi) berkas calon nasabah pinjaman yang bersangkutan. Survey yang dilakukan meliputi hal seperti letak lokasi dan kondisi usahanya.
7. Apabila melalui survey tersebut terbukti kebenarannya, bahwa data yang diserahkan adalah valid dan sah, maka kemudian mantri akan menganalisis sekali lagi berkas tersebut dan memperhitungkan berapa besar nominal pinjaman yang kiranya sesuai dengan pendapatan perbulan dan jaminan yang diagungkan oleh nasabah yang bersangkutan.
8. Langkah selanjutnya ialah mantri memberikan laporan sekaligus usulan kepada unit mengenai calon nasabah pinjaman tersebut.
9. Unit memiliki wewenang (terbatas) untuk melakukan flat terhadap sejumlah pinjaman yang diajukan. Wewenang yang dimiliki kepala unit untuk memberikan flat adalah Rp 50 juta ke bawah. Sedangkan untuk pinjaman di atas normal tersebut, flat sudah merupakan wewenang Pimpinan Cabang (Pinca).
10. Setelah mendapatkan flat, maka berkas akan diserahkan kembali kepada mantri yang berwenang yang menangani dan menyerahkan berkas sebelumnya.
11. CS memberikan kwitansi kredit untuk memberikan Surat Pengakuan Hutang kepada nasabah.¹⁸

¹⁸Kurnia Indah Sari dkk, "Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Baraka Terhadap Pendapatan Petani Bawang Merah Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang"

2.2.2.4 Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Tujuan Program KUR adalah mengakslerisasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan keiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K).
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM-K kepada lembaga keuangan.
3. Sebagai upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.¹⁹

2.2.2.5 Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program KUR

Ada 3 pilar penting dalam pelaksanaan program KUR ini, yaitu:

1. Pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian dan Kementrian Koperasi dan UKM). Pemerintah berfungsi membantu dna mendukung pelaksana pemberian berikut penjaminan kredit.
2. Lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Lembaga penjaminan dalam program ini adalah PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo)

¹⁹Kartikagaby, "Kredit Usaha Rakyat," *Blog Kartikagaby*.
<https://www.google.com/amp/s/kartikagaby.wordpress.com/2014/06/12/kredit-usaha-rakyat-kur/amp/>
(26 Februari 2019)

dan perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), Jamkrida Jatim dan Jamkrida bali Mandara.

3. Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM-K. sebagai pihak ketiga yaitu Bank penyalur terdiri dari tujuh Bank Umum dan dua puluh enam Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2.2.2.6 Sasaran Program KUR

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandirian pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari Lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR, dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

2.2.3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat

2.2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat adalah meliputi:

- 1) Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik dan sumber daya manusia (*human resources*)
- 2) Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) yang secara umum dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.
- 3) Kemajuan teknologi, merupakan factor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu: netral, hemat tenaga kerja (*labor saving*) dan hemat modal (*capital saving*)²⁰

2.2.3.2 Pendapatan

Menurut pengertian akuntansi keuangan, pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu.²¹

Menurut Santoso pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan maupun orang yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, dividen, royalti dan sewa.²²

Mankiw menyebutkan bahwa pendapatan dirumuskan sebagai hasil perkalian antara jumlah unit yang terjual dengan harga per unit. Dengan demikian pendapatan penjual diperoleh dari seberapa banyak jumlah barang yang terjual dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

²⁰Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 69.

²¹M. Fuad dkk, *Pengantar Bisnis*, (Cet. V; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 168.

²²Iman Santoso, *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 340.

Dalam kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan, pendapatan berasal dari tiga sumber yaitu:

- a. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas perusahaan dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan.
- b. Pendapatan non operasi adalah pendapatan yang terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor eksternal.
- c. Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang tak terduga, dimana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.²³

Islam sangat peduli terhadap apa yang menjadi insting dasar manusia. Dalam kaitannya memperoleh harta, islam memberikan anjuran yang perlu diperhatikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”²⁴

²³Zaki Baridwan, *Akuntansi Keuangan Intermediate: masalah-masalah khusus*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 35.

²⁴Departemen AgamaRI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung:CV Penerbit J-ART, 2004), h. 83.

Dan QS Al-Maidah Ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”²⁵

Dari ayat-ayat Al-Quran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip memperoleh harta yaitu:

- a) Mencari harta tidak boleh dengan cara yang bathil, tetapi harus saling suka sama suka, saling meridhai, tidak dengan paksaan atau ancaman.
- b) Harta harus diperoleh dengan cara jual beli yang jujur, bukan dengan cara mengeksploitasi, membebani kesulitan kepada orang lain, atau bertentangan dengan nilai seperti membungakan uang.
- c) Harta yang diperoleh harus harta yang baik bukan yang haram.

2.2.4 Ekonomi Islam

2.2.4.1 Pengertian Ekonomi Islam

Sebagian ahli memberi defenisi ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 122.

yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia

Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.²⁶

Umar Chapra berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan Maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat.

Menurut M.Hasanuzzaman ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.

Muhammad Nejatullah al-Siddiqi berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Qur'an dan Sunnah, akal dan pengalaman.

²⁶Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyaldi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia grup, 2015), h. 6.

Menurut Syeb Nawab Haider Naqvi yang dimaksud Ilmu ekonomi Islam adalah perwakilan perilaku kaum muslimin dalam suatu masyarakat muslim tipikal.

Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam.²⁷ Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *ijma* dan *qiyas*

M. M. Metwally berpendapat bahwa ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti *al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *qiyas*, dan *ijma*. Ia memberikan alasan bahwa dalam ajaran islam, perilaku individu dan masyarakat dikendalikan kearah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada.²⁸

Sedangkan menurut M. Akram Khan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kemenangan manusia (agar menjadi baik) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerja sama dan partisipasi.²⁹

Ilmu ekonomi Islam memiliki akar teologi, tetapi ia bukanlah kajian yang mendalam tentang teologi dan memang bukan bagian dari teologi. Ilmu ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat dengan *fiqh* perundang-undangan Islam (*syariah* dan *tasyri*) terutama subjek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia (*muamalah*). Akan tetapi, ia bukanlah ilmu *fiqh*. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu

²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet.II; Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 26-28.

²⁸ Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Cet: 2; Jakarta: Kencana, 2014), h. 8-9.

²⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 5.

ekonomi dan keprihatinan utamanya adalah problem-probelam ekonomi dan istitusanya. Secara umum ekonomi islam didefenisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya meyelesaikan permasalahan-permasalahn ekonomi dengan cara-cara Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.³⁰

Muchtar Ahmad mengemukakan bahwa, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bergerak di atas norma-norma atau filosofis yang sesuai dengan tuntunan Islam menurut ajaran buku dalam Al-Quran dan hadis.³¹

Q.S an-Naba'/78:10-11

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Terjemahnya :

Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidup

2.2.4.2 Sistem Ekonomi Islam

Islam membedakan antar ilmu ekonomi dengan system ekonomi. Definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan

³⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *EkonomiIslam* (Cet. IV: Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 17.

³¹Andi Bahri, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Ummat* (Cet.I;Stain Parepare, 2013), h. 19-20.

secara sistematis. Jadi system dapat didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya.³²

Perbedaan mengenai ilmu ekonomi dan sistem ekonomi muncul dikarenakan hal berikut:

- a. Dalam pemenuhan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta kekayaan (barang dan jasa) melalui teknik produksi.
- b. Dalam pengaturan urusan masyarakat dari segi cara memperoleh, memanfaatkan dan mendistribusikan kekayaan.

Pembahasan pertama lebih banyak berkaitan dengan kegiatan teknik memperbanyak jumlah barang dan jasa serta bagaimana cara menjaga pengadaannya (produksi), pembahasan ini lebih tepat dikategorikan dalam ilmu ekonomi. Pembahasan kedua sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kekayaan, tetapi hanya berhubungan dengan tata kerja (mekanisme) pendistribusiannya dan ini lebih tepat dikategorikan system ekonomi.

Dengan demikian, system ekonomi merupakan bagian dari system tatanan kehidupan masyarakat yang terkait dengan cara pandang atau ideologi tertentu. Berbeda dengan ilmu ekonomi bersifat universal, tidak terkait dengan ideologi tertentu.³³

³²M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 13.

³³M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 13-14.

2.2.4.3 Nilai-Nilai Dasar Ekonomi

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi islam. Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar system ekonomi Islam, antara lain:

a. Kepemilikan

Nilai dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam diantaranya:

1. pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
2. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan islam.
3. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.

b. Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimary*), dan menjadi pemborosan (*extravagance*). Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan.

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁴

c. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan.³⁵

1. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam
2. Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan memberantas keborosan ke dalam keadilan distribusi adalah penilaian terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar sebenarnya.

Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar tau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq dan shadaqah.³⁶

Dengan demikian yang dimaksud dengan *al-adl'* didefinisikan sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi dari ekonomi dari nilai ini adalah bahwa

³⁴ Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta Pusat: Media Dakwah dan LIPPM), h. 43-49.

³⁵ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 59.

³⁶ Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Islami Sistem Ekonomi Islam*, h. 59-65.

pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan alam.³⁷

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembahasan makna yang terkait dengan judul akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman, oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan tentang makna dari judul tersebut.

2.3.1 Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efektivitas yang dimaksud peneliti ialah efektivitas penyaluran dari program Kredit Usaha Rakyat

2.3.2 Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.³⁸ Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.³⁹

³⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35.

³⁸ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h.125.

³⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Cet. Ke-1, h. 87.

- 2.3.3 Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Sedangkan yang dimaksud dari peneliti ialah kredit usaha rakyat yang ada di BRI Unit Timoreng Panua.
- 2.3.4 Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu Lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (Pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.⁴⁰ BRI yang dimaksud untuk melakukan penelitian adalah pada BRI Unit Timoreng Panua di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2.3.5 Peningkatan berasal dari kata dasar “tingkat” yang kemudian ditambah dengan imbuhan pe-an sehingga menjadi kata peningkatan. Sugono mendefinisikan peningkatan sebagai proses, perbuatan, cara meningkatkan. Sejalan dengan pendapat tersebut Alwi menyatakan bahwa peningkatan adalah proses perbuatan, cara meningkatkan usaha, dan sebagainya.⁴¹ Peningkatan adalah proses cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu untuk

⁴⁰http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia.19 Juni 2019.

⁴¹Pgsdblog, “*Pengertian Peningkatan Pembelajaran,*” .
<http://pgsdblog.blogspot.com/2017/11/pengertian-peningkatan-pembelajaran.html?m=1> (28 Juni 2019)

usaha kegiatan dalam memajukan kea rah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

- 2.3.6 Ekonomi menurut etimologi ekonomi berasal dari Bahasa oikononemi (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata :*oicos* yang berarti rumah dan *nomos* berarti aturan jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk mnyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volkshuishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam Bahasa Inggris sebutkan sebagai *economics*
- 2.3.7 Analisis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (larangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musahab, duduk perkara, dan sebagainya).⁴²
- 2.3.8 Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan Syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat

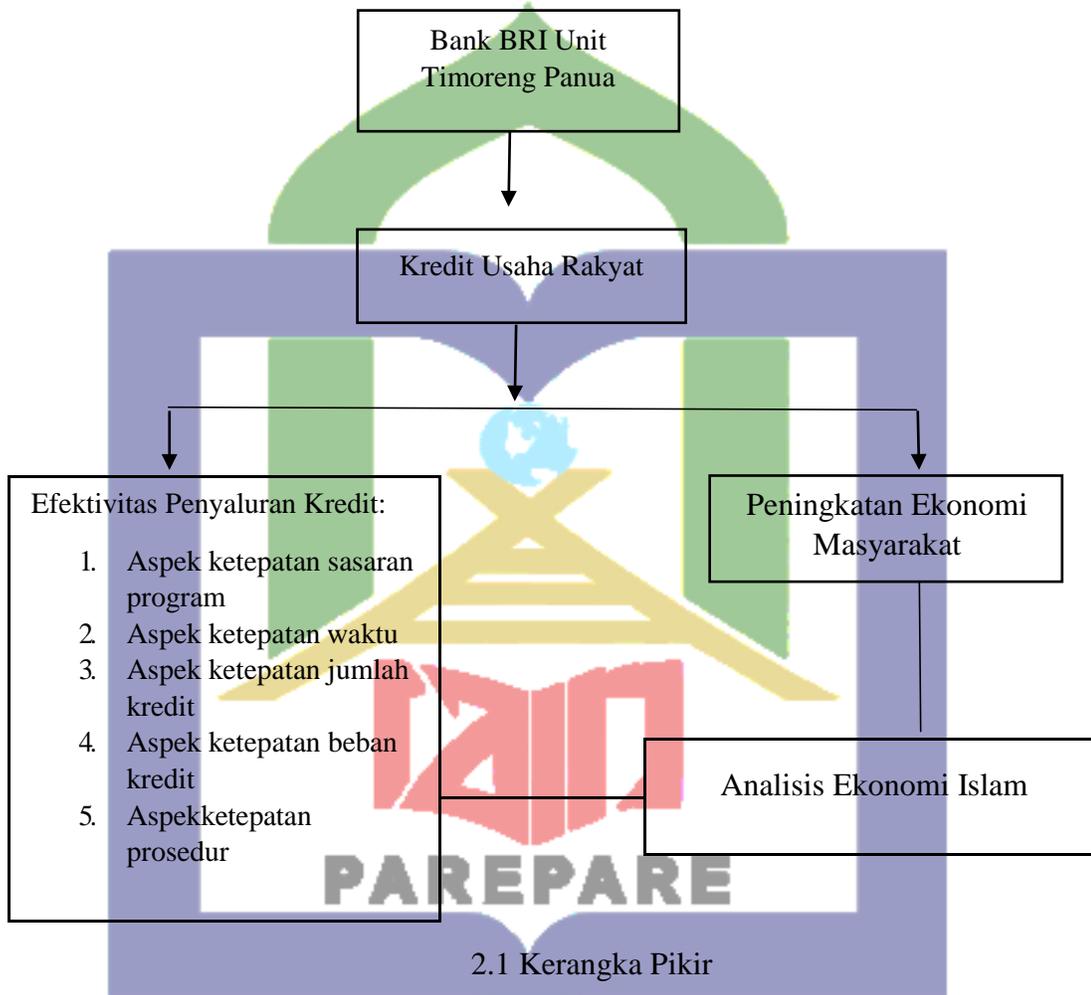
Berdasarkan penjelasan diatas, maka maksud dari judul penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat di BRI Unit Timoreng Panua terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dengan menggunakan analisis ekonomi Islam yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pelaksanaan ekonomi Islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

⁴² Kementerian Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 60.

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT, kepada manusia
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Syariah adalah kerja sama
- d. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja
- e. Ekonomi Syariah menajamin pemelikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat kelak nanti
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi nisab
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk
- i. Layaknya sebuah bangunan system ekomomi Syariah harus memiliki pondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Evaluasi terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu dilakukan untuk mengetahui apakah program tersebut telah berjalan efektif atau tidak. Sebuah program dikatakan berhasil jika program tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan proses yang telah ditentukan dan mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam pengembangan usaha melalui bantuan yang diberikan pemerintah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).



Berdasarkan uraian diatas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Timoreng Panua salah satu bank yang menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR), kemudian program ini di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tambahan/ pinjaman untuk usaha mereka. Setelah program berjalan pihak bank memastikan

program telah berjalan secara produktif dan efektif sehingga tercapainya target penyaluran program kredit usaha rakyat.

Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam penyaluran kredit usaha rakyat dapat di ukur menggunakan lima aspek, yaitu aspek ketepatan sasaran, aspek ketepatan waktu, aspek ketepatan jumlah uang yang diterima oleh nasabah, aspek ketepatan beban kredit dan aspek ketepatan prosedur.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.¹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita *empiric* dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita *empiric* dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

¹Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah di BRI Unit Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. 2 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

3. 3 Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3. 4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.² Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dokumen tidak resmi yang kemudian dioleh peneliti.³ Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴ Responden dalam hal ini adalah masyarakat yang menerima penyaluran KUR. Sumber data primer adalah Bank Penyalur (BRI Unit Timoreng Panua). pada sumber data primer; pihak penyalur (BRI Unit Timoreng

²Bagong Suryanto, dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁴Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2002), h. 34.

Panua) yang dimaksud adalah terdiri dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam proses penyaluran dana KUR tersebut. masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang menerima penyaluran KUR.yang selanjutnya disebut populasi. Populasi tersebut akan dipersempit dengan menentukan kriteria sampel, yaitu masyarakat yang merasakan langsung penyaluran dana oleh bank.

3. 4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵ Penulis memerlukan adanya dokumen yang berupa arsip-arsip dari Bank BRI Unit Timoreng Panua.

3. 4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

3. 5.1 Observasi

Yaitu metode pngumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

3. 5.2 Wawancara

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁶ Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 1997), h. 128

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.⁷ Responden yang dimaksud pada penelitian ini adalah karyawan BRI dan juga masyarakat yang menerima dana KUR

3. 5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁸ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil atau mengutip data yang ada dalam arsip data di Bank BRI Unit Timoreng Panua.

3. 5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.⁹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu

⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik Edisi VII* (Bandung: CV Tarsito, 1990), h. 174.

⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁹Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁰

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3. 6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting. Dalam penelitian ini data yang direduksi berkisar pada temuan-temuan lapangan.

3. 6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan dampak-dampak dari adanya penyaluran kredit usaha rakyat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

3. 6.3 Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu Lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (Pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (*Exim*)

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank Yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank umum.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI Unit dan 357 Pos Pelayanan Desa.

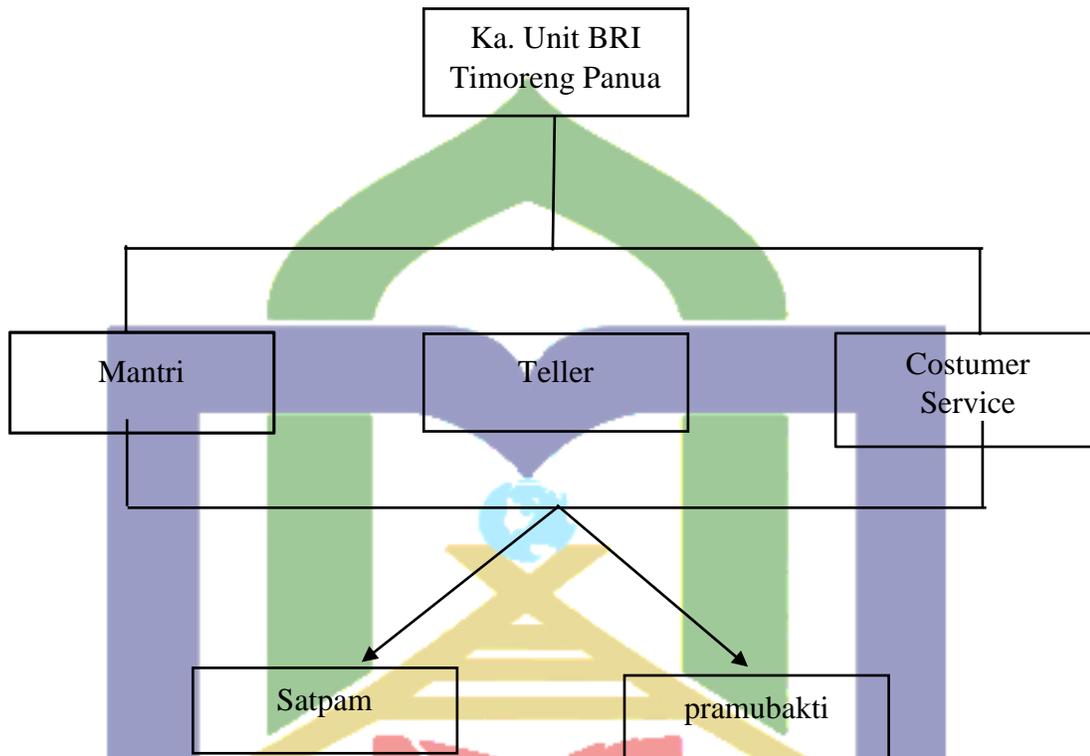
Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia Unit Timoreng panua ini sendiri berada di Jalan Andi Pettarani No. 539 Sidenreng Rappang. Bank BRI memiliki visi dan misi yang selalu dijadikan landasan dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Visi dari Bank BRI adalah menjadi bank konvensional

terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Sementara itu, misi dari Bank BRI adalah:

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan visi BRI Unit adalah:

1. Berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menyediakan jasa layanan perbankan, utamanya untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, dengan pelayanan yang prima dan didukung oleh SDM yang handal.
2. BRI unit sebagai Lembaga perantara keuangan yang mandiri dan berkesinambungan bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, dikelola secara profesional dan menguntungkan tanpa meninggalkan fungsinya sebagai *agen of development*



4.1 Struktur Organisasi BRI Unit Timoreng Panua

4.1.1 Ruang Lingkup Wewenang dan Mekanisme

4.1.1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Unit

- a. Tugas pokok, yaitu memimpin kantor BRI Unit dan mengembangkannya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya. Mengadakan hubungan kerja yang baik dengan intern dalam batas wewenangnya. Mampu melaksanakan kerja mantri, *Teller*, dan *Customer Service* apabila bersangkutan tidak dapat hadir.

- b. Tanggung jawab, yaitu kelancaran tugas-tugas operasional termasuk efisiensi dan tercapainya tingkat kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh setiap petugas BRI Unit. Bertanggung jawab atas ketersediaan kas yang selalu cukup. Terselenggaranya kerja sama yang baik dengan instansi lain. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan atas diri sendiri dan bawahannya. Menjamin bahwa pekerjaan diselesaikan di hari yang sama dengan aplikasi yang di terima dari nasabah kecuali izin khusus. Menjamin bahwa pinjaman unit telah dilaksanakan dan diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Mantri

- a. Tugas pokok, yaitu pemeriksaan permintaan pinjaman ditempat usaha nasabah yang meliputi usahanya dan letak jaminan serta menganalisisnya kemudian mengusulkan putusan pinjaman kepada Kepala Unit. Melakukan pembinaan kepada nasabah simpanan dan pinjaman. Melakukan pemberantasan tunggakan dengan cara memeriksa di tempat nasabah secara langsung. Menyampaikan laporan kepada Kepala Unit atas hasil atau hasil kunjungan dan pengamatannya kepada nasabah. Apabila di jumpai penyimpangan dalam melaksanakan operasional BRI Unit harus segera melaporkannya kepada Kepala Unit pada hari itu juga.
- b. Tanggung jawab, yaitu kebenaran hasil pemeriksaan ke tempat nasabah yang meliputi kegiatan usahanya, letak jaminannya, Analisa serta usul putus jaminannya. Ketepatan pemasukan angsuran pinjaman dan ketepatan pemasukan tunggakan pinjaman. Perkembangan dan kemajuan usaha pinjaman, simpanan dan pelayanan jasa bank lainnya di BRI Unit.

Penguasaan data dan pemanfaatan situasi dan perkembangan perekonomian di wilayah kerjanya guna kepentingan BRI Unit. Penguasaan dan perkembangan usaha masing-masing nasabah. Terpeliharanya citra BRI Unit khususnya dan BRI pada umumnya di mata masyarakat.

4.1.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab *Teller*

- a. Tugas pokok, yaitu bersama-sama kepala unit menyelenggarakan pengurusan kas kantor BRI Unit. Menerima setoran dari nasabah dan memvalidasikannya kedalam komputer bagi unit yang sudah memakai teknologi computer. Membayar kepada nasabah yang berhak atas pengambilan simpanan sebatas kewenangan yang dimilikinya. Memfiat (persetujuan bayar) simpanan dan jasa bank lain dalam batas wewenang yang diberikan oleh pimpinan cabang. Menyetorkan kelebihan maksimum kas selama jam kerja ke kas induk dengan menggunakan tanda setoran. Menjaga kerahasiaan password. Melakukan validasi bank transaksi tunai pada saat pelayanan. Memelihara register kesalahan validasi bersama dengan kepala unit.
- b. Tanggung jawab, yaitu kelancaran dan ketepatan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran uang dari dan ke nasabah. Keamanan dan kecocokan uang kas yang berada di ruang teller. Kebenaran dan ketelitian pembuatan transaksi teller. Kelengkapan bukti-bukti kas tunai yang berada dalam pengawasan

4.1.1.4 Tugas dan Tanggung Jawab *Customer Service*

- a. Tugas pokok, yaitu melaksanakan posting semua transaksi yang terjadi. Menata usahakan register-register pinjaman dan simpanan. Menata usahakan pengarsipan dari bukti-bukti pembukuan di dalam amplop telah ditentukan.
- b. Tanggung jawab, yaitu ketertiban dan kebenaran setiap posting transaksi yang ada. Ketertiban, kelengkapan, keamanan penyimpanan berkas simpanan dan pinjaman kartu register dan buku-buku lainnya. Ketetapan penyampaian dan kebenaran isi laporan. Ketepatan pelayanan administrasi setoran dan pengambilan hak simpanan maupun pinjaman dan jasa bank lainnya.

4.1.1.5 Pramubakti : bertugas sebagai pembantu umum yang bertanggung jawab atas semua penyajian konsumsi dan urusan kebersihan

4.1.1.6 Satuan Pengamanan (satpam) : bertugas sebagai tenaga pengamanan dan penjagaan.

4.2 Mekanisme Penyaluran Kredit usaha Rakyat (KUR) oleh BRI Unit Timoreng Panua

4.2.1 Ketentuan umum pengajuan KUR

Berdasarkan SE BRI NOSE. S.8 – DIR/ADK/02/2008, ketentuan umum dari pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 Persyaratan calon debitur atau terjamin: merupakan individu yang melakukan usaha produktif pada semua sektor yang feasible namun belum bankable.

4.2.1.2 Jenis kredit dan jangka waktu: KUR ini dapat diberikan untuk keperluan modal kerja atau modal investasi dalam jangka waktu maksimal 3 tahun.

4.2.1.3 Besar kredit: untuk kredit mikro minimal Rp 5 juta.

4.2.1.4 Suku bunga:

- a. Suku bunga yang dikenakan atas kredit adalah 7% efektif per tahun atau setara 0.41% flat per bulan tanpa ada hak PBTW (Pembayaran Bunga Tepat Waktu)
- b. Apabila terdapat perubahan suku bunga akan di sampaikan dengan surat tambahan sendiri.

4.2.1.5 Bentuk kredit

- a. Bentuk kreditnya adalah persekot non *annuity* (*flat rate*)
- b. Khusus untuk usaha musiman (pertanian, perkebunan) dengan jangka waktu kredit maksimal satu tahun, bentuk kredit dapat dilakukan tanpa angsuran atau sekaligus (pokok+ bunga)

4.2.1.6 Denda/Penalty : tidak dikenakan atas tunggakan pokok atau bunga

4.2.1.7 Biaya administrasi dan provinsi kredit tidak dipungut

4.2.1.8 Asuransi jiwa: tidak diasuransikan jiwa

4.2.1.9 Pola angsuran: pola angsuran sesuai ketentuan yang berlaku, namun apabila debitur menghendaki angsuran secara harian, mingguan atau sesuai hari pasaran atau lainnya, angsuran debitur tetap diterima.

4.2.1.10 Pelayanan KUR mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.

4.2.2 Kebijakan Prosedur Penyaluran KUR

Berdasarkan SE BRI NOSE. S. 8 – DIR/ADK/02/2008, dapat diketahui beberapa kebijakan prosedur kredit mengakut penyaluran kredit usaha rakyat antara lain:

4.2.2.1 Pemasaran KUR Mikro

Untuk menjamin agar pemasaran KUR Mikro lebih fokus serta untuk lebih mengoptimalkan fungsi pemasaran Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM), target pemasaran KUR menjadi tanggung jawab Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM). Namun demikian, kepala unit atau mantri tetap dimungkinkan untuk melakukan pemasaran KUR.

4.2.2.2 Persyaratan administrasi bagi calon debitur adalah:

- a. Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan harus disesuaikan dengan aslinya
- b. Pas foto 3x4 bagi calon debitur
- c. Surat keterangan memiliki usaha dari Kantor Desa atau Kelurahan.
- d. Pejabat kredit lini (PKL) juga harus memastikan kebenaran calon debitur
- e. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Account Officer (AO) atau kepala unit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah dan fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya
- f. Mengingat karakteristik yang beragam di berbagai wilayah, maka perlu ditegaskan kembali bahwa persyaratan di atas adalah syarat minimal, artinya dengan memenuhi syarat tersebut di atas kepada calon debitur sudah dapat dilayani KUR Mikro
- g. Terhadap dokumen kredit cukup dilakukan dibawah tangan, tidak perlu dilegalisasi.

4.2.2.3 Tahap permohonan dan pemrakarsa kredit

Pada tahap pengajuan KUR secara tertulis kepada pihak BRI Unit Timoreng Panua. Calon debitur datang ke kantor BRI Unit Timoreng Panua yang kemudian

dibantu oleh *Costumer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, yang kemudian ditanda tangani oleh pemohon. Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit. KUR diperkenalkan sebagai usaha yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana.

Dalam penyaluran kredit, dilapangan terlihat bahwa sebagian besar usaha kecil datang sendiri ke kantor BRI Unit Timoreng Panua, biasanya mereka telah membawa serta kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan KUR. Namun, ada juga diantara pelaku usaha kecil yang datang ke bank hanya sekedar untuk apakah mereka sudah dapat mengakses kredit di BRI.

Ketika nasabah datang dan bertanya mengenai KUR, biasanya petugas bertanya petugas yang menangani hal ini bertanya mengenai agunan terlebih dahulu kepada nasabah yang belum mengetahui mengenai kredit.

“biasanya kalau ada nasabah saya langsung mengarahkan ke mantri jika tujuannya untuk melakukan kredit. Akan tetapi, jika para mantri sudah tidak ada ditempat saya akan menjelaskan kepada nasabah mengenai kredit yang ada. Karena banyak nasabah yang belum tahu, dan agar nantinya bisa lebih mudah menyiapkan berkas yang dibutuhkan”.¹

Jika calon nasabah tersebut telah memiliki agunan, maka petugas bank mengarahkannya kepada kredit selain KUR seperti KUPEDES, namun apabila apabila calon nasabah tidak memiliki agunan, maka petugas akan menawarkan KUR dan menginformasikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mengakses KUR. Jika syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, biasanya petugas melakukan survey

¹ Wawancara dengan Linda Ali, *Costumer Servise Bank BRI Unit Timoreng Panua*, pada tanggal 9 September 2019.

lapangan, hal ini dimaksudkan untuk memantau usaha nasabah yang akan mengakses KUR.

“kami bertanya terlebih dahulu kepada nasabah pinjaman apa yang dibutuhkan setelah itu kami bertanya apa jaminannya. Akan tetapi nasabah biasanya langsung memutuskan untuk mengambil KUR kemudian kami akan melakukan proses berkas seperti fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, pas foto kemudian surat keterangan memiliki usaha dari kantor desa atau kelurahan”.²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu Mantri KUR bahwa sebelum memberikan pinjaman KUR, terlebih dahulu ditanyakan kepada nasabah mengenai pinjaman yang dibutuhkan. Setelah jelas keinginan dari nasabah maka pihak bank dalam hal ini mantri meminta kelengkapan dokumen seperti fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, pas foto kemudian surat keterangan memiliki usaha dari kantor desa atau kelurahan. Hal ini juga serupa dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Mantri lain yang bertugas dalam pinjaman KUR :

“kalau nasabah yang ingin mengajukan KUR tentu kami bertanya apa usahanya karena KUR hanya untuk yang memiliki usaha. seperti salah satu syarat dalam pengajuan KUR harus ada surat keterangan usaha dari kantor desa atau kelurahan setempat. Kemudian usaha yang dimiliki nasabah menjadi bahan pertimbangan kami saat akan proses pengajuan kredit. Selanjutnya kami akan melakukan *survey* lapangan atau ke tempat usaha nasabah”.³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Mantri KUR bahwa nasabah yang akan mengajukan KUR akan ditanyai mengenai usaha yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Selanjutnya, salah satu syarat yang harus ada

²Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Timoreng Panua*, pada tanggal 9 September 2019.

³ Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Timoreng Panua*, pada tanggal 9 September 2019.

adalah adanya surat keterangan usaha dari kantor desa atau kelurahan. Setelah adanya kelengkapan berkas, maka proses selanjutnya adalah dilakukan *survey* lapangan atau ketempat usaha nasabah. Melalui *survey* yang dilakukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan kredit. Selanjutnya, melalui hasil wawancara keseluruhan yang dilakukan mengenai persyaratan pada pembiayaan KUR :

- a. pengajuan permohonan kredit dilakukan oleh debitur atau terjamin. Melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak Bank adalah sebagai berikut:

“Jadi nasabah yang mengajukan kredit KUR di bank kami adalah debitur atau terjamin. Jadi maksudnya disini, nasabahnya adalah bersifat perorangan. Nasabah disini adalah yang telah memiliki usaha yang telah berjalan”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, debitur pada produk KUR adalah debitur perorangan. Selain itu dikatakan bahwa debitur disini adalah orang yang telah memiliki usaha yang telah berjalan.

- b. bagi usaha baru, minimal usaha telah berjalan 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan *Account Officer* (AO). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Bank diperoleh bahwa :

“Nasabah disini adalah yang telah memiliki usaha yang telah berjalan. Selanjutnya bagi usaha yang baru berjalan kami memiliki peraturan bahwa usaha tersebut harus berjalan setidaknya 6 bulan. Selanjutnya melalui *survey* akan dianalisis apakah usaha tersebut layak atau tidak.”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa usaha yang dimiliki oleh calon nasabah harus memiliki usaha yang setidaknya telah berjalan 6 bulan. Setelah diketahui berapa lama usaha tersebut telah berjalan maka selanjutnya yang

⁴Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 9 September 2019

akan dilakkan oleh pihak Bank adalah *survey* yang nantinya akan menentukan layak atau tidaknya nasabah memperoleh pembiayaan KUR.

- c. Pada dasarnya pelayanan KUR Mikro ini berdasarkan atas domisili tempat tinggal. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan pihak Bank :

“Nasabah yang nantinya akan memperoleh pembiayaan KUR haruslah nasabah yang berdomisili di dekat Bank atau sekitarnya. Akan tetapi ada pengecualian bagi nasabah yang tidak berdomisili di dekat wilayah BRI Unit Timoreng Panua maka harus memperhatikan beberapa hal seperti kepastian domisili.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa domisili nasabah yang akan mengajukan KUR berdomisili di dekat Bank atau sekitarnya. Akan tetapi ada pengecualian bagi nasabah yang tidak berdomisili di dekat wilayah BRI Unit Timoreng Panua maka harus memperhatikan beberapa hal seperti kepastian domisili. Namun demikian, apabila calon nasabah tidak berdomisili di wilayah BRI Unit Timoreng Panua, maka nasabah tersebut diperbolehkan namun harus memperhatikan:

1. kepastian domisili yang dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tempat asal yang masih berlaku dan dicocokkan dengan aslinya.
2. Petugas harus melakukan konfirmasi dengan BRI Unit yang berada diwilayah kerja tempat tinggal nasabah, missal mengenai informasi pinjaman maupun kepastian alamat domisili tempat tinggal calon debitur.

⁵ Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Timoreng Panua*, pada tanggal 9 September 2019.

Dalam hal permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut:

- a) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank diperoleh bahwa :

“Jadi untuk prosedur awalnya, nasabah mengajukan peminjaman dengan melengkapi berkas. Hal ini berlaku untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa prosedur awal yang harus dilakukan oleh calon nasabah adalah mengajukan peminjaman dengan melengkapi berkas yang telah ditentukan. Hal seperti ini berlaku setiap jenis pengajuan misalnya kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit ataupun perubahan terhadap persyaratan kredit.

- b) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- c) Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.⁷ Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Bank yaitu :

“Setelah permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini nasabah telah dipenuhi berdasarkan persyaratan yang ada di Bank kami. Selanjutnya pihak bank dalam hal ini yang bertugas adalah mantri memastikan kebenaran

⁶ Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Timoreng Panua*, pada tanggal 9 September 2019.

⁷ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 96.

akan informasi tersebut. salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan *survey*.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa setelah adanya permohonan yang dibuat oleh nasabah telah dipenuhi berdasarkan persyaratan yang ada di Bank. Kemudian pihak bank yang dalam hal ini mantri yang bertugas untuk memastikan kebenaran dari informasi yang diberikan oleh nasabah dengan melakukan *survey*.

- d. Proses pendaftaran dan pengisian formulir dilakukan oleh deskman atau petugas yang ditunjuk. Namun demikian untuk mempermudah atau mempercepat pelayanan, mantri dapat membantu pendaftaran atau pengisian formulir tersebut. Pada saat melakukan kunjungan lapangan formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan di deskman atau petugas yang ditunjuk untuk memulai proses kelengkapan administrasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Bank :

“Biasanya kan kalau ada nasabah yang datang kami menanyakan maksudnya. Terkadang nasabah juga langsung mengatakan maksudnya apabila akan mengajukan pinjaman KUR. Selanjutnya pihak Customer Service akan memberikan penjelasan diawal. Akan tetapi, biasanya kami langsung mengarahkan nasabah untuk menemui mantri.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa nasabah yang datang dipertanyakan mengenai maksud dan tujuannya. Selanjutnya *Customer Service* akan

⁸ Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Timoreng Panua*, pada tanggal 9 September 2019.

⁹ Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Timoreng Panua*, pada tanggal 9 September 2019.

mengarahkan dan memberikan penjelasan diawal. Selain itu, pihak *Customer Service* akan mengarahkan nasabah untuk langsung menemui mantri.

- e. Pada prinsipnya pelayanan KUR tetap mengacu kepada skim Kupedes umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang disesuaikan dengan kondisi atau pola Usaha Mikro dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan.

Dalam proses penetapan pemberian KUR, besarnya dana yang yang diberikan kepada nasabah biasanya disesuaikan dengan kondisi nasabah, misalkan pada saat kunjungan lapangan ditanyakan pendapatan perhari, pengeluaran rutin yang dilakukan tiap bulannya, hal ini guna melihat besarnya kemampuan nasabah untuk membayar KUR tiap bulannya.

“saat melakukan kunjungan atau survey lapangan ke nasabah, kami bertanya mengenai usaha yang dimiliki, berapa lama usahanya berjalan, berapa penghasilan kotor, dan bersih yang diterima oleh nasabah karena semua hal ini merupakan dasar kita mengetahui mengenai nasabah demi kelancaran kredit”¹⁰

4.2.2.4 Tahap Analisis Kredit/Tahap Pemeriksaan

Analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur atau terjamin membayar kembali kreditnya kepada bank. Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Mahmud, *Account officer BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 9 September 2019.

- a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank disediakan dengan jumlah dan jenis kredit
- b. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Hal ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank.
- c. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
 1. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
 2. Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktik *mark up* yang dapat merugikan bank.
 3. Menyajikan penilaian yang obyektif dan dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- d. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penelitian terhadap sumber pelunasan kredit yang ditetapkan berdasarkan hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko mungkin timbul.
- e. Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pada bank yang bertindak sebagai induk.

Dalam penyaluran KUR tidaklah memerlukan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu 2-3 hari atau kurang dari 1 minggu dalam mengakses KUR. semuanya tergantung pada kelengkapan berkas yang dimiliki oleh nasabah serta analisis yang dilakukan pihak bank mengenai kemampuan nasabah

Pemberian KUR tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh petugas *Account Officer* walaupun dalam pengurusannya memiliki persyaratan yang mudah. Dalam menganalisis keadaan calon nasabah, AO menggunakan prinsip sesuai dengan syarat pemberian kredit, prinsip 5C antara lain:

1. *Character*, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa di peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif, serta mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. *Capacity*, yaitu suatu penelitian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya akan dibiayai dengan kredit dari bank
3. *Capital*, yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur
4. *Collateral*, yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya
5. *Condition of Economy*, yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinan

akan dapat mempengaruhi kelancara kredit usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

Prinsip 5C inilah kemudian yang selalu diterapkan oleh para *Account Officer* dengan menganalisis kredit, baik itu KUR Mikro, maupun kredit selain KUR. Untuk KUR sendiri, yang terlihat dilapangan adalah pada saat melakukan *survey* lapangan para *Account Officer* ini juga bertanya mengenai hal yang paling penting dalam prinsip 5C yaitu karakteristik calon nasabah, biasanya selain bertanya pada tetangga rumah atau tempat usaha, para petugas ini pun bertanya pada nasabah lain yang memiliki usaha yang berdekatan dengan calon nasabah tersebut atau minimal mengetahui mengenai nasabah tersebut.

Namun KUR Mikro, tidak semua prinsip 5C diterapkan, biasanya pada C yang keempat yaitu *colleteral* (jaminan) ini tidak dilihat. Dalam menganalisis KUR Mikro ini petugas biasanya menitikberatkan pada karakter calon nasabah tersebut, kondisi usaha dan kemampuan calon nasabaah tersebut dalam membayar kredit tersebut nantinya jika permintaan mengenai KUR tersebut dikabulkan.

4.2.2.5 Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit uaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pada BRI Unit Timoreng Panua sebelum pemberian keputusan kredit, Kepala Unit BRI Timoreng Panua wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut:

- a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya
- b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C) serta independent
- c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.¹¹

4.2.2.6 Tahap Pencairan kredit/Akad Kredit

Setiap proses pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat akan ditetapkan dalam perjanjian telah terpenuhi oleh pemohon kredit.¹² Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* BRI Unit Timoreng Panua

“jadi pada saat pencairan, kami menyiapkan terlebih dahulu berkas-berkas yang akan ditandatangani oleh nasabah”

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut:

¹¹Rahmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 52.

¹² Rahmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, h. 52.

- a. Persiapan pencairan. Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Customer Service* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:
 1. Memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya
 2. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
 3. Mengisi kwitansi pencairan KUR
- b. Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR: berkas atau kelengkapan pencairan diisi adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan KUR. *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan KUR telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diarahkan kepada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada kepala unit untuk difiat bayar.

Sebelum adanya keputusan pemberian KUR, biasanya nasabah diberitahukan terlebih dahulu besarnya kredit yang didapatkan dan angsuran perbulannya, sehingga nasabah bisa mempersiapkan dana sejak dini dan tidak memberatkan nasabah tersebut. sehingga setiap bulannya nasabah bisa menyisihkan uang sesuai dengan kredit mereka terhadap BRI.

4.3 Efektivitas Penggunaan Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan ekonomi Masyarakat

Untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Ketepatan Sasaran.

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. dari hasil wawancara penulis dengan pihak bank:

“dalam pemberian KUR kami banyak melakukan pertimbangan mulai lingkungan calon nasabah, tingkah laku, dan yang paling utama dalam pembiayaan KUR adalah calon nasabah jelas memiliki usaha karena KUR diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari kantor desa atau kelurahan setempat. Kemudian usaha dari calon nasabah ini minimal harus berjalan 6 bulan”.¹³

Sistem penyaluran KUR yang dilakukan di BRI Unit Timoreng Panua dilakukan dengan berbagai mulai lingkungan calon nasabah, tingkah laku, dan yang paling utama dalam pembiayaan KUR adalah calon nasabah jelas memiliki usaha karena KUR diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari kantor desa atau kelurahan setempat. Kemudian usaha dari calon nasabah ini minimal harus berjalan 6 bulan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu nasabah KUR BRI Unit Timoreng Panua

¹³Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 9 September 2019.

“ketika akan melakukan peminjaman dana KUR di bank biasanya ada pihak bank datang ke rumah melakukan survey, jadi dipastikan dulu apa memang nasabahnya itu punya surat keterangan usaha. Selain itu banyak juga berkas lainnya yang diminta oleh pihak bank.”¹⁴

Dalam mengakses KUR terlebih dahulu calon nasabah harus menunjukkan berkas-berkas yang dimintai atau dibutuhkan oleh pihak bank. Hal serupa juga diperoleh melalui wawancara penulis dengan nasabah KUR yang lainnya :

“iyya meloki mala dana KUR ipalengka’I berkas ta misalna KTP, KK, surat keterangan usaha pole ekko kantor desa/kelurahan. Apana ekko meloki mala dana KUR engka pole bank ma survey”¹⁵.

Melalui wawancara tersebut, nasabah lainnya mengatakakan bahwa kelengkapan berkas seperti KTP, KK, surat keterangan usaha memang harus kami sediakan sebelumnya. Karena ketika pihak bank akan memberikan pinjaman KUR sebelumnya dilakukan survey. Selain itu, melalui surat keterangan usaha yang ada dijadikan bahan pertimbangan untuk pengajuan pinjaman.

Selain itu, mengenai kelengkapan berkas yang harus dilengkapi oleh pihak nasabah juga dijelaskan oleh pihak bank bahwa tujuan kelengkapan berkas tersebut merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah program pembiayaan KUR telah tepat sasaran. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pihak bank :

“Jadi seperti ini, melalui kelengkapan berkas kita lebih mengenal nasabah apakah memang program ini telah sesuai dengan nasabah yang akan kita berikan peminjaman dana. Hal ini biasanya kami melakukan survey kepada nasabah untuk memastikan program ini menjadi tepat sasaran. Kan mengingat program ini untuk meningkatkan usaha yang dimiliki oleh nasabah. Jadi

¹⁴Wawancara dengan Aris, *Penerima dana KUR BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 12 September 2019.

¹⁵Wawancara dengan Abbas, *Penerima dana KUR BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 14 September 2019.

sasaran yang ingin kita capai adalah bagaimana nasabah dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha melalui KUR”¹⁶

Dalam proses pencairan KUR pihak nasabah terlebih dahulu melakukan survey kepada nasabah untuk memastikan program ini menjadi tepat sasaran. Mengingat program ini untuk meningkatkan usaha yang dimiliki oleh nasabah. Jadi sasaran yang ingin kita capai adalah bagaimana nasabah dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha melalui KUR.

2. Aspek Ketepatan Waktu.

Adanya batasan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam pemberian kredit pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba). Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Bank :

“Untuk program KUR ini, kami mengusahakan akan memberikan ketepatan waktu dalam realisasinya. Jadi kami berharap dengan proses yang cepat dapat membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya. Biasanya dalam peminjaman dana KUR maksimal 3 tahun. Itu tergantung dari pihak nasabah mau ambil tenggal waktu berapa lama.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak bank, diperoleh bahwa ketepatan waktu dalam hal ini adalah ketepatan antara waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk dana KUR maksimal 3 tahun..

Selain itu, hasil wawancara penulis dengan nasabah KUR mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pemberian KUR ini adalah

¹⁶ Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 9 September 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 14 September 2019.

“Kalau dulu ketika saya mengajukan peminjaman KUR waktunya 3 tahun kemudian saya ditawarkan kembali untuk melanjutkan peminjaman saya jadi saya lanjut kembali.”¹⁸

Ketepatan waktu untuk meningkatkan efektivitas KUR juga dilakukan melalui nasabah lama. penawaran dana kembali juga dilakukan hal ini dikarenakan bank melihat nasabah yang memiliki pembayaran yang lancar.

3. Aspek Ketepatan Jumlah

Yaitu ketepatan jumlah yang akan di terima oleh nasabah peminjam kredit dari dana yang di ajukan sebelumnya oleh para nasabah. Dalam pemberian kredit pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

Mengenai ketepatan jumlah yang akan di terima oleh nasabah peminjam kredit dari dana yang di ajukan sebelumnya oleh para nasabah. Dalam pemberian kredit pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Diperoleh bahwa :

“Kalau untuk jumlah pinjaman yang akan kita berikan kepada nasabah adalah tergantung hasil survey yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kan awalnya ditanya kepada nasabah berapa dana yang dibutuhkan selain itu tergantung pada kemampuan nasabah untuk membayar. Jadi kita lihat bagaimana

¹⁸ Wawancara dengan Syahrul Yasmin, *Penerima dana KUR di BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 19 September 2019.

kemampuan nasabah berdasarkan penghasilannya. Kalau untuk jumlah maksimal itu Rp. 25.000.000,-.”¹⁹

Jumlah pinjaman yang akan kita berikan kepada nasabah adalah tergantung hasil survey yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kan awalnya ditanya kepada nasabah berapa dana yang dibutuhkan selain itu tergantung pada kemampuan nasabah untuk membayar. Jadi kita lihat bagaimana kemampuan nasabah berdasarkan penghasilannya. Kalau untuk jumlah maksimal itu Rp. 25.000.000,-. Selain itu, hasil wawancara yang lainnya dengan pihak bank mengenai ketapan jumlah diperoleh :

“Kalau mengenai jumlahnya, biasanya diawal peminjaaman dan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh pihak kami, jumlah awal sekita Rp. 15.000.000,-. Kalau untuk diawal peminjaman biasanya kami tidak langsung memberikan jumlah yang banyak. Hal ini karena kami ingin melihat kemampuan nasabah. Selanjutnya, jika proses pembayaran yang dilakukan nasabah baik setelah enam bulan kami kadang menawarkan perpanjangan kredit kepada nasabah. Selain itu juga ada peningkatan jumlah peminjaman yang kami berikan”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak bank diperoleh bahwa biasanya diawal peminjaaman dan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh pihak kami, jumlah awal sekitar Rp. 15.000.000,-. Kalau untuk diawal peminjaman biasanya kami tidak langsung memberikan jumlah yang banyak. Hal ini untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar.

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan dengan nasabah mengenai ketepatan jumlah yang akan di terima oleh nasabah peminjam kredit dari dana yang di ajukan sebelumnya oleh para nasabah. Dalam pemberian kredit pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.

¹⁹ Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 14 September 2019.

²⁰ Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 14 September 2019.

“dulu diawal itu saya diberikan pinjaman Rp. 8.000.000,-. Kemudian dilihat lagi bagaimana pembayarannya apakah lancar, nanti kalau lancar biasanya ditawarkan lagi untuk jumlah yang lebih banyak. Biasanya dipeminjaman kedua atau ketiga saya diberikan jumlah yang maksimal Rp. 25.000.000,”²¹

Ketepatan jumlah yang diterima oleh nasabah berdasarkan kemampuan pembayaran yang dimiliki oleh nasabah. Selain itu, diawal peminjaman jumlah yang diberikan kepada nasabah awalnya Rp. 8.000.000,-. Setelah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah lancar akan ditawarkan jumlah yang lebih banyak. Jumlah yang diberikan kepada nasabah untuk peminjaman selanjutnya adalah jumlah maksimal yaitu Rp. 25.000.000,-.

4. Aspek Ketepatan Beban Kredit

Yaitu ketentuan yang disepakati oleh debitur terhadap kreditur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembebanan (bunga) kredit. Bunga pinjaman merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak Bank mengenai ketetapan beban kredit diperoleh :

“Kalau mengenai ketepatan beban kredit dalam KUR ini kami jelaskan kepada nasabah ketika proses pencairan. Jadi ketika melakukan proses pencairan, Customer Service menjelaskan bahwa seperti ini beban kredit yang ada, seperti ini jumlah yang harus dibayar setiap bulannya.”²²

Ketepatan beban kredit dalam KUR menjelaskan kepada nasabah ketika dalam proses pencairan. Ketika proses pencairan KUR, pihak customer service menjelaskan beban kredit yang harus ditanggung serta jumlah yang harus dibayar setiap bulannya.

²¹ Wawancara dengan H. Usman Laupe, *Penerima dana KUR di BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 17 September 2019.

²² Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 14 September 2019.

Hal serupa juga diperoleh ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu nasabah

“Kalau proses pencairan, biasanya sebelum tanda tangan dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak banknya. Jadi kami tau bahwa jumlah yang harus dibayar setiap bulannya setiap ini. Selain itu, dijelaskan juga berapa lama jangka waktunya.”²³

Dalam proses pencairan biasanya sebelum tanda tangan peminjaman diberikan terlebih dahulu oleh pihak bank. Hal ini dimaksudkan agar nasabah dapat memahami jumlah yang harus dibayar setiap bulannya.

5. Aspek Ketepatan Prosedur

Adalah langkah langkah yang telah ditetapkan oleh pihak Bank dan disepakati oleh nasabah agar proses peminjaman dapat dilaksanakan. Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk di berikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak bank:

“yang pertama itu dalam prosedur pengajuan KUR yaitu pemberkasan seperti fotocopy KTP suami/istri, KK, Pas photo, dan surat keterangan dari kantor desa kemudian survey lokasi usaha calon nasabah, selanjutnya pemeriksaan berkas terakhir putusan apakah layak di berikan dana KUR atau tidak”.²⁴

Dalam tahap pengajuan KUR calon nasabah harus melengkapi berkas-berkas seperti fotocopy KTP, KK suami/istri, Pas photo dan surat keterangan usaha dari kantor desa atau kelurahan. Surat keterangan ini dapat menjadi pertimbangan pihak

²³ Wawancara dengan Ridwan, *Penerima Dana KUR di BRI Unit Timoreng Panua* pada tanggal 20 September 2019.

²⁴ Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer/Mantri Bank BRI Unit Timoreng Panua*, pada tanggal 9 September 2019.

bank untuk memberikan dana kepada calon nasabah. Hal ini juga berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah yang menerima KUR:

“waktu mau ka ambil KUR disruhka lengkapi berkas-berkasku seperti fotocopy KTP, KK, pas poto suami/istri sama surat keterangan usaha dari kantor desa atau kelurahan sudanya itu ku lengkapi mi berkasku terus ku kasihmi pihak banknya na proses l”.²⁵

4.4 Analisis Ekonomi Islam terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BRI

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofi, instrumental maupun institusional atau Al-Quran dan hadis yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yaitu ditematkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama ilmu ekonomi. Tentu saja, Al-Quran dan Hadis bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi ilmu pengetahuan. Mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan (diperas) menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islami. Inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan *derivative* dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih fokus. Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang mendai sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antara lain:

4.3.1 Kepemilikan

²⁵Wawancara dengan Arnita Amaliya, *Penerima KUR di BRI Unit Timoreng Panua*, pada tanggal 22 September 2019.

Nilai dasar pemilikan dalam system ekonomi Islam, diantaranya terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Mengenai hal ini, berhubungan mengenai bagaimana pemerintah memiliki peran untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi pemerintah memanfaatkan dana yang ada dengan menyalurkan dana dalam bentuk kredit terhadap masyarakat yang membutuhkan dana dalam usahanya guna meningkatkan perekonomian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan peran dan fungsi dari pihak-pihak pelaksana KUR yang telah diatur dalam Inpres No. 6 tanggal 8 Juni 2007, pada tabel berikut:

Para Pihak	Fungsi
Pemerintah (6 Menteri)	
Departemen Keuangan	a. Membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan berikut penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi
Departemen Kehutanan	
Deprtemen Kelautan dan perikanan	
Departemen Perindustrian	
	b. Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai

Departemen Negara KUKM	<p>dengan kredit/pembiayaan.</p> <p>c. Menetapkan kebijakan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan</p> <p>d. Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan</p> <p>e. Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/off taker yang memberikan kontribusi dan dukungan kelancaran usaha.</p>
Perbankan (6 Bank)	
Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank BTN, Bukopin, Bank Syariah Mandiri	Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit /pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perusahaan Penjamin Kredit	
PT ASKRINDO dan Perum Sarana Pengembangan Usaha	Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan perbankan sesuai dengan ketentuan asuransi

4.3.2 Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, missal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimary*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi , terutama menjauhi konsumerisme, dan mejauhi pemborosan berlalku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Furqan/25 : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
 وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
 وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.²⁶

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.²⁷ Relevansinya antara nilai keseimbangan yang dijelaskan dalam ekonomi Islam dan penyaluran KUR, adalah terletak pada pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban disini adalah yang penting. Hak dari masyarakat yang memperoleh bantuan dana KUR haruslah dibarengi dengan kewajiban dalam menjalankan kreditnya.

Bagi pihak BRI Unit Timoreng Panua kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 511.

²⁷Ahmad Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta Pusat: Media Dakwah dan LIPPM), h. 43-49.

wawancara dengan account officer BRI Unit Timoreng Panua, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak antara lain.²⁸

4.3.2.1 Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kredit (BRI Unit Timoreng Panua)

a. Hak Kreditur

Hak -hak yang dimiliki oleh pihak kreditur disini ditulis berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh *account officer* BRI Unit Timoreng Panau, dimana pihak berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila debitur lalai dalam artian menunggak, maka kreditur dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak debitur.

Dalam hal ini penyelesaian kredit bermasalah, Mahmud juga mengungkapkan bahwa BRI Unit Timoreng Panua berhak memberi kelonggaran penunggakan kredit bermasalah dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pihak BRI Unit Timoreng Panua juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debiturnya apabila debitur nyata-nyata melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan kredit awal.

b. Kewajiban Kreditur

BRI Unit Timoreng Panua sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman KUR. Mahmud juga mengatakan bahwa BRI Unit Timoreng Panua juga mempunyai kewajiban lain yaitu melakukan pembinaan kepada beberapa debitur dari jumlah total

²⁸Wawancara dengan Mahmud, *Account Officer*/Mantri Bank BRI Unit Timoreng Panua, pada tanggal 9 September 2019.

debitur. Debitur kemudian diberi arahan mengenai pinjaman kredit usaha rakya yang ditujukan untuk modal usaha harus dipertimbangkan antara daerah tempat tinggal debitur dengan kecocokan usahannya.

4.3.2.2 Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Debitur

a. Hak Debitur

Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur. Selain itu, debitur juga berhak menentukan pula angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur. Dalam hal ini pengajuan permohonan kredit, debitur berhak mendapat pembinaan dari pihak bank agar kreditnya berjalan lancar.

b. Kewajiban Debitur

Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Menurut keterangan Mantri (AO) BRI Unit Timoreng Panua, debitur tidak dibebankan biaya-biaya lain seperti biaya administrasi. Selain itu, debitur juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir pengajuan permohonan kredit dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh BRI Unit Timoreng Panua.

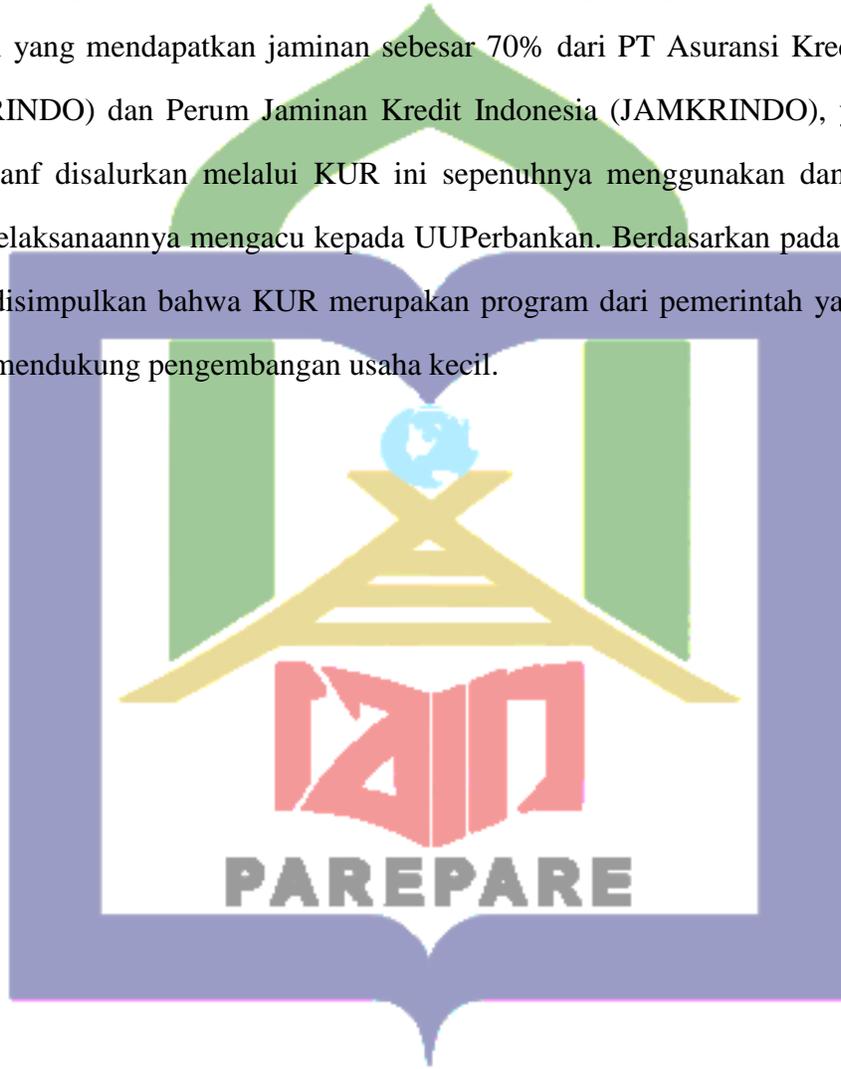
4.3.3 Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan.²⁹ Berdasarkan prinsip keadilan ini,

²⁹P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20 08), h. 59.

penyaluran KUR dapat menjadi salah satu bentuk keadilan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang memerlukan dana untuk pengembangan usaha mereka dan juga memiliki penjamin.

Pada prinsipnya dikatakan bahwa KUR merupakan jenis kredit dari perbankan dengan yang mendapatkan jaminan sebesar 70% dari PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO), yang dimana dana yang disalurkan melalui KUR ini sepenuhnya menggunakan dana perbankan serta pelaksanaannya mengacu kepada UUPerbankan. Berdasarkan pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUR merupakan program dari pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha kecil.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Timoreng Panua melalui beberapa tahap yaitu Tahap permohonan dan pemrakarsa kredit, Tahap Analisis Kredit/Tahap Pemeriksaan, Tahap Pemberian Putusan Kredit dan Tahap Pencairan kredit/Akad Kredit yang secara keseluruhan dilakukan oleh Pihak Bank BRI Timoreng Panua dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
- 5.1.2 Efektivitas Penggunaan Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan ekonomi Masyarakat dilakukan menggunakan aspek-aspek Aspek Ketepatan Sasaran, Aspek Ketepatan Waktu, Aspek Ketepatan Jumlah, Aspek Ketepatan Beban Kredit, dan Aspek Ketepatan Prosedur yang secara keseluruhan dilakukan oleh Pihak Bank BRI Timoreng Panua dalam penyaluran KUR agar berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
- 5.1.3 Analisis Ekonomi Islam dalam penyaluran KUR kepada masyarakat Timoreng Panua berdasarkan pada nilai yang menjadi sumber umber dari dasar system ekonomi Islam, antara lain Kepemilikan, keseimbangan dan keadilan agar dapat efektif dalam penyalurannya sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kelacaran produk KUR di BRI Unit Timoreng Panua sebagai berikut:

- 521 Bagi masyarakat yang menerima pembiayaan KUR agar lebih bijak dalam menggunakan dana yang diberikan oleh pihak bank. Agar lebih merasakan manfaat adanya penyaluran KUR terhadap peningkatan perekonomiannya.
- 522 Bagi pihak BRI diharapkan terus menerus memberikan pembelajaran dan arahan kepada masyarakat yang menerima KUR dan selalu melakukan pengawasan kepada nasabah secara rutin.
- 523 Bagi penulis sendiri diharapkan agar penulisan skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya dalam bidang perbankan dan ekonomi islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama.
- Anzhori, Abdul Ghofur. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al Arif , Nur Rianto dan Euis Amalia. 2014. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* . Cet: 2; Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suhartini. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rienaka Cipta.
- Assauri, Sofyan. 1980. *Manajemen Produksi* . Jakarta: FE-UI.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bahri, Andi. 2013. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Ummat*. Cet.I;Stain Parepare.
- Fahmi, Irham. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyaldi. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia grup
- al-Fazurahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf.
- Firdaus, Rahmat, dan Maya Ariyanti. 2003. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung. Alfabeta,
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gandaprawira, D. 1992. *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Hana, Erlinda, 2014. "Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Kinerja usaha Kecil Di Kota Makassar". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis:Universitas Hasanuddin.

- Handayani, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- I Gusti, Alit.S “*Efektivitas dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*” Skripsi Sarjana; Universitas Udayana
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Bisnis Kredit Perbankan. Cet. II*; Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama.
- al-Kaff, Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: .Pustaka Setia Pertama.
- Karim , Adiwarman A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
2000. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Karnida, Barad dkk. 2013. Direktori SKIM Kredit Perbankan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013. Kalimantan Tengah: Unit Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Grafindo Persada
2012. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*.
- Kunarjo. 2003. *Glosarium Ekonomi, Kuangan dan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* . Jakarta: Rajawali Pers.
2002. *Manajemen Bank Syariah* . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nabani, Taqiyuddin. 1999. *An-Nidlam al-Iqtishadi fi al-Islam Membangun Sistem Ekonomi Alternatif:Perpspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nitisusatro, Mulyadi. 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Alfabeta.

- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. 2015. “*Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Kredit*”. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. *Islamic Ecomics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Santoso, Iman. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siti Fatimah, 2013. “*Efektivitas Program kredit Usaha rakyat di BRI Unit Karang Ampel dalam Peningkatan Wirausaha Keluarga di Desa Karang Ampel Indaramayu*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Tarbiyah: Institut Agama Islam Negeri Cirebon.
- Subandi. 2016. *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta.
- Sumiarti, Murti. 1987. *Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty
- Supramono, Gatot. 1994. *Hukum Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik Edisi VII*. Bandung: CV Tarsito.
- Tantric, Francis. 2009. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- The Aman, Edy Putra. 1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Liberty.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), “Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Situs Resmi TNP2K*, www.tnp2k.go.id/idthanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ 28 Maret 2019
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi*. Parepare: STAIN Parepare.
- Yasanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- <https://bri.co.id/kur>
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia. 19 Juni 2019.

Surya Pos, “*Pengertian Ekonomi Islam*”, Artikel yang diakses dari <http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html>. (1 januari 2019)



RIWAYAT HIDUP



Asniah, lahir di Lautang Salo pada tanggal 16 Februari 1997 dari pasangan Bapak Tajuddin dan Ibu Namriyah. Penulis adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di jalan Latami, Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2009 lulus dari SD Negeri 6 Timoreng Panua. Selanjutnya pada tahun 2012 lulus dari Mts YMPI Rappang dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) YMPI Rappang lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Islam yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang beralih status ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kalempang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Mega KCP Sengkang Wajo hingga tugas akhir menyusun skripsi dengan judul “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)”.



